

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENINGKATKAN KINERJA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DI LAMPUNG SELATAN

**Ella Nuryamah¹, Prof. Dr. Paiman Rahardjo M.Si²
Dr. Harry Nenobais .M.Si³**

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia
E-mail/korespondensi: ellanuryamah@gmail.com

Abstract

National Economic Empowerment (PEN) regulated by Government Regulation Number 23 of 2020 aims to protect, maintain, and increase the economic capacity of business actors in running their business during the COVID-19 pandemic. For MSMEs, this research program is to find out how the implementation of National Economic Empowerment (PEN) is expected to 'longer the breath' of MSMEs and improve the performance of MSMEs that contribute to the economy of South Lampung. Because MSMEs are the most flexible sector in trade and are a big contributor to economic movements in South Lampung. Restrictions on social interactions such as lockdowns and PSBB, which on the one hand were carried out to reduce the spread of COVID-19, also had an impact on sluggish economic activity and a decline in economic movement. The results of this study are 1. The influence of the PEN policy on MSMEs in South Lampung. 2. Strengthening the domestic economy through government spending 3. Business incentives, 4. Support for health, 5. Providing cash assistance to underprivileged communities (Social Protection) 6. Support for affected companies/Corporate Financing 7. Subsidies MSME interest

Keywords: National Economic Empowerment (PEN), UMKM, ECONOMY

Abstrak

Pemberdayaan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemic COVID-19. Untuk UMKM, program Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Nasional (PEN) yang diharapkan dapat 'memperpanjang nafas' UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Lampung Selatan. Karena UMKM adalah sektor yang paling luwes dalam perdagangan dan menjadi penyumbang besar bagi pergerakan ekonomi di Lampung Selatan. Pembatasan interaksi sosial seperti lockdown dan PSBB yang pada satu sisi dilakukan untuk menekan angka persebaran COVID-19, juga berimbas pada lesunya aktivitas ekonomi dan turunnya pergerakan ekonomi. Hasil dari Penelitian ini adalah 1. Adapun pengaruh kebijakan PEN terhadap UMKM di Lampung Selatan. 2. Memperkuat ekonomi domestik melalui belanja pemerintah 3. Insentif dunia usaha, 4. Dukungan untuk kesehatan, 5. Pemberian bantuan tunai bagi masyarakat kurang mampu (Perlindungan Sosial) 6. Dukungan bagi perusahaan terdampak/ Pembiayaan Korporasi 7. Subsidi bunga UMKM

Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi Nasional (PEN) UMKM, PEREKONOMIAN

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 memukul perekonomian Indonesia, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu dampaknya terdapat dari penurunan penjualan yang hampir dirasakan oleh seluruh UMKM. Sebanyak 36,7%, responden mengakui tidak ada penjualan. Selanjutnya, sebanyak 26% responden mengakui terdapat penurunan lebih dari 60%. Di sisi lain, hanya 3,6% yang mengalami kenaikan penjualan. Survei tersebut dilakukan oleh Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) terhadap 6.405 responden. Daerah responden meliputi lebih dari 50% di Jawa dan Bali, sisanya tersebar di seluruh Indonesia.

Melihat keberadaan UMKM yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia bisa menjadi salah satu pendorong dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia tidaklah sedikit, menurut BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia hingga 64 juta dan menjadi 99,9 persen usaha yang bergerak menopang perekonomian di Indonesia.

Langkah terkait pemulihan ekonomi, dalam hal ini pemerintah melalui kementerian keuangan membuat kebijakan luar biasa untuk memitigasi dampak covid-19 dan perlambatan ekonomi dengan membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi

para pelaku usaha dalam menjalankan usaha dalam masa pandemi covid-19 serta untuk meningkatkan kinerja UMKM yang sudah berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

Terbentuknya Komunitas UMKM Kabupaten Lampung Selatan diharapkan bisa menjadi wadah bagi para pelaku UMKM untuk saling bertukar informasi, bertukar ilmu, dan saling mendukung antara satu UMKM dengan UMKM lainnya. Keberadaan Komunitas UMKM tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan produktivitas dan pemasaran hasil industri kecil dan menengah, sehingga ke depannya komunitas UMKM itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya Komunitas UMKM ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian khususnya UMKM yang ada di desa- desa. Tujuan dilaksanakannya pengukuhan tersebut agar Komunitas UMKM Kabupaten Lampung Selatan mempunyai identitas yang legal secara hukum.

Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Lampung Selatan tahun 2021 sebesar Rp90 Miliar. Pinjaman itu ditujukan untuk peningkatan 2 ruas jalan poros kabupaten, yang masing-masing yakni ruas Simpang Serdang - Jatibaru - Talang Jawa - Batas Lampung Timur, sepanjang 20,71 KM. Kemudian ruas Sidomulyo - Sidoarjo - Bumidaya - Palas, sepanjang 26,12 KM. Dua ruas jalan itu diajukan untuk dilakukan

peningkatan karena kondisi jalan yang sudah sangat memprihatinkan. Tujuannya adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan-jalan poros yang ada di Sidomulyo sampai Palas terus Serdang sampai perbatasan Lampung Timur yang bisa dilihat sendiri kondisi infrastrukturnya sangatlah memprihatinkan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Lamsel. Untuk kepentingan masyarakat, kesejahteraan, peningkatan perekonomian itu dasarnya. Supaya masyarakat yang dilalui jalan poros yang akan dibangun itu terdampak.

METHODOLOGI PENELITIAN

Dalam konteks penelitian, paradigma dapat diartikan sebagai acuan yang menjadi dasar bagi setiap peneliti untuk mengungkapkan fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukannya (Arfin, 2012). yang dominan yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. kualitatif berlandaskan paradigma konstruktivisme yang berpandangan bahwa pengetahuan itu bukan hanya merupakan hasil pengalaman terhadap fakta, tetapi juga merupakan hasil konstruksi pemikiran subjek yang diteliti. Salah satu pelayanan administrasi dalam percepatan reformasi birokrasi adalah meningkatkan pelayanan publik yang semula belum berbasis online menjadi sistem informasi berbasis online.

Cara yang dipakai dalam penelitian inilah yang disebut

dengan metode penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Taylor dan Bogdan Saerat Muhadjir dalam Afrizal (2014:12) bahwa "metode penelitian diartikan sebagai cara yang dipakai oleh para peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas pertanyaan – pertanyaan penelitiannya".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Menurut Sugiyono (2012:13) Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrument maka peneliti harus mempunyai bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data orang yakni: Kementerian Keuangan Perwakilan Lampung Selatan, Pelaku UMKM Perwakilan Lampung Selatan, Kantor Koperasi Wilayah Perwakilan Lampung Selatan

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data ini sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data, dengan cara memilah mana data yang penting atau tidak. Ukuran penting atau tidaknya mengacu pada kontribusi data tersebut pada upaya menjawab fokus penelitian (Gunawan, 2013:209). Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moleong (2013:248) mengatakan analisis data kualitatif adalah: Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Tahapan dalam teknik analisis data yang diawali dengan mengatur dan menyiapkan data untuk dianalisis, mencari informasi, melakukan analisis berdasarkan pendekatan teoritis, mengidentifikasi tema dan menafsirkan makna dari data yang diperoleh harus dilaksanakan secara sistematis agar mendapatkan data yang diinginkan dalam penelitian.

Dalam bagian ini akan dibahas empat pendekatan dalam analisis data yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, diantaranya adalah reduksi data dikategorisasikan dengan koding, penyajian (display) data dan verification. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan keempat pendekatan analisis data yang akan menjadi panduan saat penelitian berlangsung.

1. Reduksi Data

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam reduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai, tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuannya (Sugiyono, 2013:338).

Menjaga konsistensi dan reliabilitas data dalam penelitian kualitatif tidak mudah. Untuk menjaga konsistensi dan realibilitas ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh peneliti. Pertama peneliti dapat melakukan coding pada dokumen yang sama dalam waktu yang berbeda dan membandingkan hasilnya. Kedua, peneliti dapat membandingkan kode – kode yang telah dihasilkan (Sarosa, 2011:75- 76).

2. Display Data (Penyajian Data)

Langkah kedua setelah reduksi Data adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja. (Gunawan, 2013:211).

3. Verification

Langkah terakhir adalah verification atau disebut juga sebagai penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2013:345).

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Dari seluruh rangkaian analisis data merupakan proses siklus, interaktif dan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul (Gunawan, 2013:212).

PEMBAHASAN

Terbentuknya Komunitas UMKM Kabupaten Lampung Selatan diharapkan bisa menjadi wadah bagi para pelaku UMKM untuk saling bertukar informasi, bertukar ilmu, dan saling mendukung antara satu UMKM dengan UMKM lainnya. Keberadaan Komunitas UMKM tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah

dalam upaya meningkatkan produktivitas dan pemasaran hasil industri kecil dan menengah, sehingga ke depannya komunitas UMKM itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya Komunitas UMKM ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian khususnya UMKM yang ada di desa-desa. Tujuan dilaksanakannya pengukuhan tersebut agar Komunitas UMKM Kabupaten Lampung Selatan mempunyai identitas yang legal secara hukum. Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai strategi yaitu:

- a. Mengembangkan sentra UMKM unggulan berbasis ekonomi kreatif
- b. Meningkatkan akumulasi, aksesibilitas dan kemampuan permodalan
- c. Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM pelaku usaha UMKM
- d. Meningkatkan mutu, sertifikasi maupun standarisasi mutu proses, produksi dan produk KUKM-IKM
- e. Pengembangan ciri khas/keunikan produk daerah
- f. Sektor UMKM serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Lampung Selatan masih menjadi salah satu penyangga pertumbuhan ekonomi Lampung pada tahun 2022. Wabah pandemi covid-19 yang telah melanda hampir dua tahun ini sangat berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi. Karenanya, keberadaan UMKM dan IKM diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian daerah.

Pemprov Lampung sangat konsentrasi dengan kemajuan UMKM dan IKM. Melalui satuan kerja terkait, kita akan terus melakukan upaya untuk mendukung ekspansi dan inovasi. Indonesia yang menjadi negara urutan keempat jumlah penduduk terbanyak di dunia sangat berpotensi untuk dijadikan pasar utama domestik dalam memasarkan produk yang dihasilkan pelaku UMKM dan IKM. Sebetulnya pasar domestik sudah lebih dari cukup. Namun, karena kekuatan kita maka bisa menembus pasar ekspor. Kita harus lebih banyak lagi memproduksi namun yang berstandar baik dan dimintai pasar eksport.

UMKM merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Lampung Selatan, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan digali kembali potensi-potensi yang ada untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat. Pengembangan ini tentu saja akan lebih berkembang dengan baik dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan dan kemajuan usaha yang dijalankan agar dapat menghasilkan kualitas produksi yang baik sehingga dapat bersaing dengan pasar internasional. Hal ini sesuai seperti yang diungkapkan oleh PBB dalam (Luz. A.Ein-siedel, 1968, h. 9), bahwa: SHPEDQJXQDQ masyarakat, merupakan suatu "proses" dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat

diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan

Melalui program PEN, Pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan berbagai langkah untuk meminimalisir dampak dari Covid-19 terhadap ekonomi, baik di tingkat individu/rumah tangga hingga korporasi. Dampak ekonomi yang sangat disruptif dari Covid-19 juga harus direspon dengan Langkah kebijakan yang juga luar biasa, bahkan belum pernah dilakukan sebelumnya (*unprecedented*). Secara umum, terdapat 6 kebijakan utama program PEN, yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pembiayaan korporasi, serta program sektoral Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Program PEN diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Peranan program PEN yang sangat krusial di dalam situasi pandemi ini membuat Pemerintah sangat berhati-hati dan memegang prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk menjaga azas keadilan sosial dan penggunaan PEN untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemerintah akan terus memastikan transparansi dan akuntabilitas dari program ini, dan menjaga agar tidak terjadi *moral hazard*. Tingginya ongkos yang diperlukan untuk pendanaan PEN

juga mendorong untuk terjadinya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Restrukturisasi kredit UMKM adalah bagian penting dalam melindungi keberlangsungan usaha bagi kelompok ini di tengah pandemic yang menghentikan berbagai aktivitas usaha secara signifikan. Selain itu, untuk menghidupkan kembali bisnis dan mempercepat pemulihan ekonomi, diperlukan tambahan kredit modal kerja baru. Untuk mendukung hal-hal tersebut, Pemerintah melakukan penempatan dana di bank, yang merupakan instrumen berbeda dengan pinjaman likuiditas BI. Total kebutuhan dana untuk restrukturisasi UMKM ini adalah Rp78,78 triliun. Beberapa persyaratan utama untuk penempatan dana yakni Bank memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai bank umum; mempunyai kegiatan usaha di wilayah RI dan mayoritas pemilik saham/modal adalah Negara, Pemda, Badan Hukum Indonesia, dan/atau Warga Negara Indonesia; serta memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3 yang telah diverifikasi OJK.

Pemerintah Lampung Selatan mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemda memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan

untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah.

Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik.

KESIMPULAN

1. PEN yang diatur oleh Peraturan [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020](#) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat 'memperpanjang nafas' UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Lampung Selatan. Karena UMKM adalah sector yang paling luwes dalam perdagangan dan menjadi penyumbang besar bagi pergerakan ekonomi di Lampung Selatan. Pembatasan interaksi sosial seperti lockdown dan PSBB yang pada satu sisi dilakukan untuk menekan angka persebaran COVID-19, juga berimbas pada lesunya aktivitas ekonomi dan turunnya pergerakan ekonomi.
2. Dampak kebijakan PEN terhadap UMKM di Lampung Selatan sangat mendukung

perekonomian masyarakat disamping mampu memperkuat ekonomi domestik melalui belanja pemerintah (Sektoral dan Pemda) dengan memberikan kebijakan seperti:

- a. Insentif dunia usaha
- b. Dukungan untuk kesehatan
- c. Pemberian bantuan tunai bagi masyarakat kurang mampu (Perlindungan Sosial)
- d. Dukungan bagi perusahaan terdampak/Pembiayaan Korporasi
- e. Subsidi bunga UMKM

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Budi Winarno, Ph.D, Teori Kebijaksanaan Publik, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989.
- Dye Thomas R, Understanding Public Policy Making, New York: Holt, Rinehart & Winston, 1981.
- Ery Suryanti, H. I. (2020). Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM (Studi kasus pada UMKM MITA). Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 60-72.
- Ezizwita, & S. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Kuliner dan Strategi Beradaptasi di Era New Normal. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, 23(1), 51-56
- Fadilah Nur Azizah, I. F. (2020). Strategi UMKM untuk Meningkatkan Perekonomian selama Pandemi Covid-19 pada saat New Normal. Journal homepage: <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/oje>, 46-62.
- Hardilawati, W. L. (2020, Juni). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. Jurnal Akuntansi & Ekonomika, 10(1), 89-98.
- Hayatul Cholsy, A. F. (2020, Oktober). Pendampingan UKM Bidang Fashion pada masa Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bakti Budaya, 3(2), 175-182.
- Gibson, Ivanovich, Donnely, 1989, Organisasi dan Manajemen, Erlangga, Jakarta.
- Hessel, Nogi s. Tangkilisan, Drs, M.Si, Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2003.
- Islamy, M. Irfan, DR, MPA, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, cetakan ke 8, Jakarta, 1997.
- Marginingsih, Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM, 2021
- Moloeng, Lexy. J, 2001, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mar'at., Sikap Manusia: Perubahan dan Pengukuran, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982.

- Robbins, Stephen P, *Perilaku Organisasi*, Edisi Kesepuluh, PT. Indeks, Jakarta, 2006.
- Samudra Wibawa, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta, 1994.
- Subarsono, AG, Drs, M.Si, MA, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Steers, Ricard M., (terjemahan), 1985, *Efektivitas Organisasi*, Cetakan Kedua, Erlangga, Jakarta.
- Suci, Y. R. (2017, Januari). *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*, 1, 51-58.
- Siagian, A. O., & Cahyono, Y. (2021). *Strategi Pemulihan Pemasaran UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Pada Sektor Ekonomi Kreatif*. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis- JTEKSIS*, 3(1), 206-217.
- Sudati Nur Sarfiah, H. E. (2019). *UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa*. *Jurnal REP*, 4(2), 1-189.
- Sugeng Haryono, N. (2018). *Efektifitas Penggunaan Media E-Commerce Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Depok Dilihat dari Etika Bisnis*. *Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat*, 152-158.
- Undang-Undang No. 20. (2008). *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*.
- Umar, Husein, 2001, *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework in : Administration and Society*, Vol. 6 No. 4 p. 445-485. clvi
- Wahab, Solichin Abdul, DR, MA, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- Widjaja, 2000, *Ilmu Komunikasi Pengantar Study*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.
- Yoshio, Alfons, Katadata (2020) *Realisasi Program PEN Capai Rp 440 Triliun, Bantu UMKM Bertahan*. Retrived July 11, 2021, from <https://katadata.co.id/ariemega/berita/5fd46595013bd/realisasi-program-en-capai-rp-440-triliun-bantu-umkm-bertahan>

Peraturan-peraturan

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/Pmk.05/2020 Tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Peraturan Pemerintah, 2020, No. 23 (n.d.). *Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*. Retrieved July 10, 2021 from <https://www.kemenkeu.go.id/media/15124/faq-pp-no-23-2020.pdf>
- Putri, A. S. (2019). *Peran UMKM dalam Perekonomian*

Indonesia. Retrieved July 10, 2021, from <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia?page=all>

Jurnal

Balitbang, Buleleng. (2020). Kajian Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap UMKM Di Kabupaten Buleleng. Retrieved July 11, 2021, from <https://balitbang.bulelengkab.go.id/upload/konten/69-kajian-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-umkm-di-buleleng.pdf>
[Penanggulangan-Dampak-Covid-19-terhadap-UMKM-Final-v10.pdf](https://balitbang.bulelengkab.go.id/upload/konten/69-kajian-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-umkm-di-buleleng.pdf)

Faqir, A. Al. (2021). Program PEN Bantu Bangkitkan Geliat UMKM Selama Masa Pandemi. Retrieved July 10, 2021, from <https://www.merdeka.com/uang/program-pen-bantu-bangkitkan-geliat-umkm-selama-masa-pandemi.html>

Hamidah, Q. R., Sejati, A. T. P., & Mujahidah, A. Z. (2019). The Development of Small and Medium Businesses (MSMEs) Based on Tecnology to Deal with The Industrial Revolution 4.0. Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series, 2, No. 1, 345–349. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/shes.v2i1.38431>

Saputra, D. (2021). Survei BI : 87,5

Persen UMKM Indonesia Terdampak Pandemi Covid-19. Retrieved July 10, 2021, from

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210319/9/1370022/survei-bi-875-persen-umkm-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19>

Bappenas. (2020). Kajian Kebijakan Penanggulangan Dampak COVID-19 terhadap UMKM Survei Kebutuhan Pemulihan Usaha Bagi UMKM Indonesia. Retrieved from <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2020/12/BA-PPENAS->